

REINVENSI PARADIGMA BAGI PEMBANGUNAN: Akhir Sains Modern dan Awal Sains Baru

Darmawan Salman

Fakultas Pertanian dan Kehutanan Unhas

ABSTRACT

Reinvenisi Paradigm for development intended for the replying of question: (i) how various development paradigm emerge and become the base for its follower? (ii) what ontology boundary, and how mechanism epistemologis, what come up as distinguishment in the middle of emulation usher the the paradigm? (iii) of bargain aksiologis to what end which is consisted in at the opposite of differing of various existing paradigm? Through comprehensive analysis to base multiparadigms, this article is opinion to two alternative, first attend the paradigm of digitalism- information which in fact only result of hop from modern science paradigm, second attend the paradigm of holism-dialogism representing result from a revolution of science paradigm, a success define development as effort improve the capacities tatanan of ever able to adapt with the environmental change so that can create the opportunity from that change. This opinion recommend (i) Development ideally not seen at area its compiler sector then are / that sector is corrected by partial with the assumption that quantifying of result of that correction is development face. (ii) of development Planning ideally more meant as "preparation tatanan to face the environmental dynamics tatanan in future". (iii) Operationally, strive the creation can implementation of through capable development policy formulation, in the middle of writhing area autonomy in this time.

Key words: Multiparadigms, Paradigm Holism-Dialogism, New Science

PENDAHULUAN

Saat ini praktis tidak ada lagi paradigma pembangunan yang dominan. Tidak ada lagi pendasaran tunggal didalam negara/pemerintah memformulasi kebijakan dan rencana pembangunannya. Bahkan negara/pemerintah dengan paradigma yang dipilihnyapun tidak lagi otomatis menjadi pelaku tunggal pembangunan. Berbagai paradigma, melalui penganutnya masing-masing, bersaing untuk dapat berposisi sebagai pendasaran pembangunan, baik oleh negara maupun oleh pelaku non-negara. Sebuah era dimana pergeseran sekaligus pengkompleksan paradigma terus berlangsung.

Dalam dinamika bagaimana berbagai paradigma pembangunan tersebut muncul dan menjadi

pendasaran bagi penganutnya? Batas-batas ontologis apa, dan mekanisme epistemologis bagaimana, yang tampil sebagai pembeda di tengah persaingan antar paradigma tersebut? Tawaran aksiologis untuk apa yang terkandung dibalik keberbedaan berbagai paradigma yang ada? Tulisan ini bermaksud menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, sekaligus menganalisis kecenderungan terakhir praksis pembangunan: apakah melanjutkan pengkompleksan paradigma atau mendasarkan diri pada sains baru (*new science*)?

PERGESERAN-PERGESERAN PARADIGMA

Paradigma Modernisasi

Paradigma modernisasi adalah paradigma yang paling banyak telah dianut oleh negara berkembang. Agen

pembangunan internasional dan pemerintah negara berkembang telah menjadikan paradigma ini sebagai acuan otoritatif di dalam mana ia dilaksanakan sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Paradigma modernisasi berpandangan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan disebabkan oleh ciri kultural dan struktural masyarakat negara berkembang itu sendiri. Untuk pembenahannya, perubahan harus dilakukan pada kultur dan struktur internal tersebut. Perubahan dimaksud diskenariokan berlangsung dalam bentuk transformasi kultural dan struktural dari ciri masyarakat tradisional ke ciri masyarakat modern. Proses ini yang disebut modernisasi.

Pada dimensi kultural, modernisasi menganjurkan pembongkaran tradisi masyarakat. Intinya adalah rasionalisasi, dan agar rasionalisasi berlangsung cepat, ruang normatif yang rigid harus digeser ke ruang normatif yang elektif, dengan itu perubahan menjadi terlembagakan (Germani, 1981). Pada dimensi sosiologis, modernisasi menekankan perlunya diferensiasi sosial, suatu proses dimana masyarakat mengalami perbanyakan fungsi dan lembaga yang dengan itu pencapaian tujuan berlangsung lebih efektif dan efisien (Smelser, 1969). Pada dimensi psikologis, modernisasi mengharuskan adanya kelompok masyarakat yang memiliki motif berprestasi (*need for achievement*), karena dengan motif berprestasi itu kelompok wiraswasta muncul dan menjadi penggerak ekonomi modern (McClelland, 1964). Pada dimensi ekonomi, modernisasi menghendaki perubahan struktur ekonomi dalam suatu pentahapan terencana yang meniru perkembangan yang dilalui negara maju (Rostow,

1960). Agar transformasi ekonomi ini berlangsung, modernisasi menganjurkan negara berkembang diberi bantuan dana pembangunan untuk menggerakkan investasi.

Dalam prakteknya, pembangunan ekonomi kemudian menjadi arus utama dari proses modernisasi. Ideologi pembangunan yang dianut adalah pertumbuhan, efisiensi dan kompetisi; tujuan pembangunan lebih berfokus pada ekspansi produktivitas ekonomis; sasaran pembangunan pada pembenahan sumberdaya, pengembangan teknologi dan perbaikan cara produksi; dimana unit operasional dari semua upaya pembangunan adalah level nasional. Dengan modernisasi, pemasukan modal asing, pengembangan teknologi modern, perbaikan dan pengembangan prasarana, serta pengembangan pondasi ekonomi, ditempatkan sebagai sarana utama dari pembangunan. Ketika angka GDP, perolehan devisa dan penyerapan tenaga kerja pada tingkat nasional telah meningkat, maka dianggap sukseslah pembangunan. Dan dalam prosesnya birokrat, lembaga pembangunan internasional serta perusahaan multinasional, tampil sebagai aktor utama.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, dibawah paradigma modernisasi dengan *main-stream* pada pembangunan ekonomi, kemajuan ekonomi kemudian dicapai negara berkembang. Tetapi, realitas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut sulit dipelihara keberlanjutannya, dan dalam pada itu fenomena ketergantungan semakin nyata, realitas kemiskinan tetap persisten, degradasi lingkungan semakin terjadi, dan pada berbagai kasus muncul gejala dedemokratisasi.

Dapat disimpulkan bahwa dengan paradigma modernisasi pertumbuhan ekonomi negara berkembang dapat dibenahi, tetapi di balik itu berbagai masalah baru muncul, dan beberapa masalah lama juga tetap tidak bisa dibenahi. Artinya, dengan meminjam pemikiran Kuhn (1962) tentang revolusi paradigma, dalam berbagai aspek paradigma modernisasi telah mengalami anomali bahkan menuju fase krisis, dan karena itu muncul paradigma baru.

Paradigma Dependensi

Paradigma dependensi muncul sebagai reaksi terhadap paradigma modernisasi yang terlalu menekankan faktor internal dari situasi kemiskinan dan keterbelakangan. Paradigma dependensi berpandangan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan bukan disebabkan oleh kondisi internal masyarakat, melainkan karena faktor eksternal berupa hubungan eksploitatif antara negara berkembang dengan negara maju. Karena itu, bila negara berkembang ingin lepas dari kemiskinan dan keterbelakangan, mereka harus membebaskan diri dari eksploitasi negara maju, mereka harus memutuskan ketergantungan pada negara maju.

Teori dependensi klasik mengemukakan adanya dua kelompok negara di dunia yakni negara metropolis/inti dan negara peri-phery/pinggiran. Akar dari kemiskinan dan keterbelakangan adalah eksploitasi yang dilakukan oleh negara inti kepada negara pinggir (Baran, 1957; Frank, 1967). Dari model inti-pinggiran tersebut tercipta sistem pembagian kerja internasional yang bersifat vertikal, dimana negara inti memproduksi komoditas industri yang nilai tambah dan *spin-offnya* tinggi,

sedangkan negara pinggir memproduksi produk pertanian yang nilai tambah dan *spin-offnya* rendah (Prebisch, 1953; Galtung, 1971). Perbedaan nilai tambah dan *spin-off* akibat pembagian kerja vertikal ini yang menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan negara berkembang. Teori dependensi juga berpandangan bahwa kemiskinan dan keterbelakangan disebabkan oleh penghisapan surplus atas negara pinggir melalui pengembalian bantuan kapital, teknologi dan SDM (Dos Santos, 1971). Teori-teori ini merekomendasikan bahwa kalau kemiskinan dan keterbelakangan ingin dihapuskan, maka negara pinggir harus memutuskan hubungan dengan negara inti.

Teori dependensi baru lebih moderat dalam melihat hubungan eksploitatif negara berkembang dengan negara maju. Hopkins dan Wallerstein (1977) melihat bahwa hubungan inti-pinggiran bersifat dinamis. Sebuah negara pinggir tidak selalu berposisi pinggir, ia dapat maju menjadi negara semi-pinggir bahkan menjadi negara inti. Penganjur teori dependensi baru (Cardoso, 1973; Warren, 1980; dan Evans, 1981) juga melihat bahwa hubungan inti-pinggir sebenarnya tidak sejelek yang digambarkan teori dependensi klasik, karena dalam kondisi bergantung negara berkembang dapat mencapai berbagai kemajuan dalam industrialisasi, suatu proses yang disebut mereka sebagai "*dependent development*". Teori dependensi baru merekomendasikan bahwa hubungan inti-pinggir tidak menjadi masalah sepanjang dalam proses itu negara pinggir dapat mencapai kemajuan.

Dari berbagai proposisi tersebut,

terlihat bahwa ideologi dari paradigma dependensi adalah penghapusan ketergantungan negara berkembang kepada negara maju. Dalam paradigma dependensi, diasumsikan bahwa pembangunan untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan harus berlangsung dalam proses yang mandiri, tidak bergantung pada bantuan investasi dan teknologi dari negara maju. Karena itu, tujuan pembangunan bagi paradigma dependensi adalah pembebasan negara berkembang dari eksploitasi negara maju, promosi ekonomi mandiri pada dunia ketiga, dan perbaikan tatanan ekonomi dan sosial dunia internasional. Sasaran pembangunan bagi paradigma dependensi adalah perbaikan pembagian kerja internasional dalam konteks hubungan antara kelompok yang berkuasa (negara inti) dengan kelompok yang tertindas (negara pinggiran). Sarana untuk mencapai tujuan pembangunan yang demikian adalah reformasi radikal struktur politik dan ekonomi domestik oleh kelompok yang tertindas, dalam arti bahwa ketika kelompok tertindas telah muncul sebagai pengganti rezim yang penindas, maka rezim baru inilah yang akan memperjuangkan kemandirian atau pemutusan hubungan dengan negara inti. Ini menunjukkan bahwa unit pembangunan bagi paradigma dependensi adalah level nasional dan internasional dengan pelaku utama adalah rakyat tertindas atau publik secara umum.

Paradigma Ekologi

Paradigma ekologi muncul sebagai reaksi atas efek degradasi ekologis dari pertumbuhan ekonomi yang menjadi *main-stream* paradigma

modernisasi. Pencemaran air, polusi udara, kepunahan plasma nutfah dan hewan langka, penghancuran hutan, pendangkalan sungai, kerusakan ozon, perluasan gurun, kemunculan penyakit baru, dan berbagai masalah lingkungan lainnya, diajukan sebagai daftar dampak dari pertumbuhan ekonomi yang tidak mengindahkan kelestarian ekologis. Ideologi dari paradigma ini adalah perlindungan sumberdaya alam dan ekosistem dari berbagai kerusakan. Ditekankan bahwa pembangunan harus memperhatikan kelestarian sumberdaya alam dan ekosistem secara sama sungguh-sungguhnya dengan upaya pencapaian pertumbuhan ekonomi.

Paradigma ekologi terutama didukung oleh teori entropi dan teori pembangunan berkelanjutan yang diajukan oleh "*club of Rome*" dan penggagas "*limits to growth*", serta beberapa teori yang diderivasi dari pemikiran *post-modernism* (Gardner dan Lewis, 1996). Teori entropi menekankan bahwa lingkungan alam akan sampai pada batas daya dukungnya bila dieksploitasi terus menerus. Teori pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa karena adanya batas daya dukung lingkungan, maka pembangunan harus mempertimbangkan keberlanjutan daya dukung tersebut melalui penghematan, pelestarian dan rehabilitasi. Sedangkan *postmodernism* menekankan bahwa narasi besar tentang efisiensi dan efektivitas demi pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh modernisasi sudah waktunya didekonstruksi dan diganti dengan narasi kecil tentang kearifan lokal dan pengetahuan asli yang lebih mengapresiasi keseimbangan tujuan ekonomi dengan daya dukung lingkungan.

Tujuan pembangunan bagi paradigma ekologi adalah terciptanya keseimbangan antara aktivitas produksi dengan daya dukung ekosistem. Sasarannya adalah perubahan cara produksi. Dikatakan bahwa kapitalisme yang menjadi nafas dari modernisasi, telah sampai pada tahap dimana tata produksinya tumbuh tidak lagi berdasar pada pertimbangan kebutuhan masyarakat, melainkan karena pertimbangan para kapitalis sendiri bahwa mereka harus merekumulasi modalnya untuk tumbuh terus (Hoogendijk, 1991). Tata produksi seperti ini perlu didekonstruksi. Diinginkan agar pabrik dan para kapitalis dikontrol untuk memproduksi barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat saja, bukan memproduksi untuk memenuhi hasrat pertumbuhan semata lalu masyarakat didikte untuk membeli dan mengkonsumsinya. Sasaran lain adalah perubahan gaya konsumsi. Dikatakan bahwa masyarakat sebagai konsumen harus disadarkan untuk membeli dan berbelanja sesuai kebutuhan saja, bukan untuk memenuhi hasrat konsumsi yang terus dibujuk rayu oleh iklan berbagai media yang memang menjadi bagian dari strategi pertumbuhan produsen kapitalis.

Dalam paradigma ekologi, sarana pembangunan yang diandalkan adalah pengembangan dan popularisasi teknologi tepat guna, dengan asumsi bahwa teknologi demikian lebih kecil efek perusakan lingkungannya dibanding teknologi canggih. Pertanian organik misalnya dimunculkan sebagai alternatif dari pertanian kimiawi. Gerakan penghematan konsumsi dan daur ulang juga ditempuh sebagai sarana pembangunan. Ekolabeling produk, konsumsi hijau, bahkan “penghijauan pembangunan”, muncul

sebagai jargon dari paradigma ini (Adams, 1993). Unit operasional dari paradigma ekologi adalah masyarakat internasional dan komunitas lokal, dengan aktor utama berbagai organisasi perlindungan lingkungan di dunia, lembaga-lembaga PBB dan masyarakat/konsumen sendiri.

Paradigma Kebutuhan Dasar

Paradigma kebutuhan dasar berpandangan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi tercapai pada tingkat nasional tetapi itu tidak menjamin bahwa kebutuhan dasar semua masyarakat otomatis terpenuhi. Di balik pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kebutuhan pangan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan tetap saja tidak terpenuhi pada berbagai lapisan masyarakat. Ini diperparah oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar lain seperti pemenuhan hak asasi manusia (terutama hak untuk bekerja, mencari nafkah yang bermakna, dan mengeluarkan pendapat), kebebasan dari ketakutan, kebebasan dari ketergantungan, dan peningkatan harga diri. Karena itu, dianjurkan agar pembangunan berfokus langsung pada pemenuhan kebutuhan dasar. Ideologi dari paradigma ini adalah keterjaminan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Argumentasi teoretis terutama datang dari Streeten (1981) bahwa selain tanah, uang dan mesin, pendidikan dan kesehatan diperlukan untuk memacu produktivitas nasional; bahwa sebagian besar penduduk miskin tidak memiliki harta selain badannya karena itu investasi SDM sangat logis; dan bahwa peningkatan pendapatan penduduk miskin memang hendaknya dibarengi dengan produksi barang dan jasa untuk konsumsi massa. Argumen ini diperkuat oleh ILO (1976)

bahwa pembukaan lapangan kerja mutlak bagi negara berkembang tidak hanya karena alasan produktivitas tetapi karena bekerja dan mendapatkan nafkah memang merupakan hak asasi.

Tujuan pembangunan bagi paradigma kebutuhan dasar adalah penghapusan kemiskinan dan peningkatan kondisi kehidupan. Sasaran yang dibenahi adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makanan dan air yang cukup bagi suatu hidup layak dan sehat, perumahan dengan sanitasi yang dapat dipertanggungjawabkan, pelayanan kesehatan dasar yang cukup dan terjangkau, kesempatan luas untuk memperoleh pendidikan, ketersediaan transportasi umum, keterpenuhan hak bekerja dan mendapatkan nafkah, dan lebih jauh lagi keterpenuhan hak untuk bebas dari ketergantungan, ketakutan dan penindasan harga diri. Sarana pembangunan bagi paradigma ini adalah perluasan dan perbaikan produksi kebutuhan hidup, perbaikan layanan publik dan dukungan administratif, organisasi warga dan aksi-aksi pendukung.

Dalam prakteknya, paradigma kebutuhan dasar mengimplikasikan hadirnya berbagai kebijakan seperti kebijakan pemilikan dan penguasaan kekayaan, kebijakan upah, kebijakan pendidikan, kebijakan perburuhan, kebijakan kesejahteraan sosial, kebijakan kebudayaan dan kebijakan tata kota serta tata ruang (Arief, 1992). Substansi dari paradigma ini juga tercerminkan dalam kebijakan investasi, kebijakan industrialisasi, kebijakan pembangunan pertanian, kebijakan pengembangan daerah dan kawasan, kebijakan fiskal dan moneter serta kebijakan teknologi.

Pembangunan dengan paradigma

kebutuhan dasar lebih banyak digerakkan oleh badan-badan PBB. Selain itu, berbagai LSM juga terlibat (terutama di bidang pendidikan dan pembenahan pemukiman kumuh), selain dari kontribusi publik sendiri. Terlihat bahwa unit pembangunan bagi paradigma ini adalah level nasional dan sekaligus unit komunitas lokal.

Paradigma ini memperlihatkan bahwa kebutuhan dasar dari penduduk lokal merupakan fokus utama dari pembangunan. Namun demikian, paradigma ini belum memperhatikan komunitas atau penduduk lokal sebagai saluran esensial dan pelaku utama dari pembangunan.

Paradigma Pembebasan

Paradigma pembebasan lahir dengan pandangan mendasar bahwa pembangunan mestinya identik dengan proses pembebasan manusia dari ketertindasan. Pandangan ini merupakan reaksi terhadap paradigma modernisasi yang tidak mampu menghapuskan ketertindasan. Bahkan dalam banyak hal, dengan paradigma modernisasi pembangunan kemudian muncul dengan wajah hegemonik, sehingga aspirasi dan tindakan yang bertentangan dengannya ditindas "oleh dan atas nama" pembangunan itu sendiri. Ideologi dari paradigma ini adalah pembebasan, demokratisasi, partisipasi warga, dan kemandirian atau kemampuan menolong diri sendiri.

Pedagogi pembebasan dari Freire (1975) sangat mempengaruhi paradigma ini. Freire mengemukakan bahwa yang penting bagi kaum tertindas adalah proses penyadaran (*conscientization*), yakni proses penumbuhan kesadaran kritis dalam diri individu tentang situasi lingkungannya agar dengan itu

individu dengan kemampuan sendiri dapat mengontrol lingkungannya. Kesadaran kritis tersebut tercapai dengan “melihat ke dalam diri sendiri” dan “menggunakan apa yang didengar, dilihat dan dialami” untuk memahami apa yang terjadi pada kehidupannya. Ini berarti bahwa individu menganalisis sendiri masalahnya, mengidentifikasi penyebabnya, dan memutuskan sendiri apa kebutuhannya, bukan dianalisis dan diputuskan oleh pakar atau agen pembangunan. Dengan itu, mereka diharapkan mampu bertindak individual maupun kolektif untuk menentang unsur penindas dari kehidupannya, termasuk memutuskan hubungan subyek-obyek untuk kemudian membentuk esensi partisipasi yang sebenarnya. Tercakup juga dalam paradigma ini adalah gerakan gender dalam arti ia merupakan upaya pembebasan dari hubungan antar gender yang tidak seimbang.

Paradigma pembebasan didukung oleh teori-teori pembangunan partisipatoris, terutama teori pembangunan masyarakat (*community development*), pengorganisasian masyarakat (*community organization*) dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Didalamnya proses penyadaran dan pengorganisasian merupakan tahapan penting agar dengan itu tindakan kolektif dapat bangkit untuk suatu transformasi sosial. Bagi paradigma pembebasan, *participatory development* dan *community empowerment* bukanlah sekedar penyesuaian struktural dari praktek pembangunan berbasis proyek, bukan pula jargon baru untuk kooptasi masyarakat, melainkan ia betul-betul ditempatkan sebagai alat transformasi

demokratik dan wahana pembebasan dari ketertindasan (Friedman, 1992; Mayo dan Craig, 1995; Rahman, 1995; Sen, 2001).

Tujuan pembangunan versi paradigma pembebasan adalah pembebasan masyarakat dari penindasan struktural dan penciptaan masyarakat demokratik. Sasarannya adalah transformasi sistem politik, ekonomi dan sosial secara total, diikuti dengan tumbuhnya kesadaran kritis pada diri warga masyarakat. Sarana pembangunan bagi paradigma ini adalah *participatory development* dan *community empowerment* untuk bangkitnya kesadaran dan kapabilitas organisasional, selanjutnya diikuti dengan transformasi struktural melalui aksi kolektif dari bawah. Pelaku pembangunan bagi paradigma ini adalah LSM dan publik, dengan unit operasional yang bergerak dari level lokal ke level nasional.

Paradigma Endogen

Paradigma endogen muncul dengan pandangan mendasar bahwa pembangunan yang berlangsung selama ini terlalu mengandalkan kekuatan luar, berskala besar dan berunit nasional, serta tidak berbasis pada kekuatan masyarakat yang mengalami pembangunan itu. Tidak berbasisnya pembangunan pada kekuatan endogen menyebabkan perbaikan yang dihasilkannya tidak berkelanjutan. Paradigma ini merekomendasikan agar pembangunan berfokus pada pemenuhan kebutuhan yang dimulai dengan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin, lalu bersamaan dengan itu pembangunan juga harus menghasilkan proses humanisasi melalui pemuasan kebutuhan akan

ekspresi, kreativitas dan penentuan jalan hidup sendiri, pada skala lokal dengan selalu mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

Paradigma endogen muncul pertama kali tahun 1975 melalui laporan Yayasan *Dag Hammarskjold* (Swedia) dalam memperingati 30 tahun PBB. Laporan berjudul "*What Now? Another Development*" tersebut menyimpulkan bahwa model pembangunan selama ini telah gagal menghapus kemiskinan massal di muka bumi, juga telah gagal mempertahankan sustainabilitasnya secara ekologis. Direkomendasikan bahwa pembangunan harus bersifat *endogeneous*, *self-reliance* dan ramah lingkungan. Pada tahun berikutnya, *The International Foundation for Development Alternatives (IFDA)* berdiri di Swiss, yang kemudian meluncurkan Proyek Sistem Ketiga (*the Third System Project*). Dalam laporannya dijelaskan bahwa selama ini beroperasi dua sistem utama penggerak perubahan yakni negara (sistem pertama) dan pasar (sistem kedua). Pada hal, di dalam masyarakat bisa ditemukan "sistem ketiga" dengan *autonomous power* yang legitimatif, yakni sekelompok orang berkesadaran kritis tentang peranan yang dimainkannya. Mereka adalah orang yang menyadari bahwa esensi dari sejarah adalah perjuangan dari rakyat untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, sesuatu yang dapat disebut sebagai proses "pemanusiaan manusia" (*humanization of man*). "Sistem ketiga" ini mencakup entitas yang secara aktif melayani kebutuhan dan *interest* masyarakat baik secara politik maupun kultural, menolong lapis bawah mengekspresikan pandangan- pandangannya, serta ikut menjadi bagian dari perjuangan

mereka. Mereka inilah elemen sebenarnya dari *civil society*. Bagi IFDA, pembangunan yang ideal adalah bagaimana mendorong masyarakat di seluruh muka bumi untuk bisa tampil sebagai "pengambil keputusan sendiri mengenai jalan hidupnya", dan itu berarti peranan dua sistem pertama yakni negara dan pasar harus mengalami reduksi (Friedman, 1992).

Ideologi pembangunan bagi paradigma endogen adalah partisipasi, kerja sama, harmoni dan interkoneksi. Menurut paradigma ini, sebuah teori pembangunan yang berlaku general sulit diformulasikan, teori pembangunan yang bisa ditemukan adalah teori pembangunan yang spesifik dan asli menurut karakteristik lokalitas. Unit pembangunan yang ideal adalah lokalitas yakni masyarakat atau komunitas lokal. Paradigma ini menspesifikasi tujuan pembangunan pada "pembentukan sistem sosial baru yang berwajah manusiawi" serta "harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan". Sasaran yang dituju adalah pemenuhan kebutuhan dasar untuk melanjutkan hidup, kelestarian lingkungan alam dan sumberdaya, serta penciptaan struktur komunitas yang manusiawi. Untuk mencapai tujuan dan sasarannya, sarana pembangunan ideal adalah pengembangan dan popularisasi teknologi tepat guna, pembangkitan kesadaran warga dan penguatan organisasi masyarakat, pemberdayaan ekonomi lokal secara berlanjut, dan reformasi struktur sosial dan politik. Pelakunya adalah kolaborasi antara warga/masyarakat sipil, perusahaan swasta, LSM-LSM lokal dan pemerintah lokal.

MENUJU PENDASARAN MULTIPARADIGMATIK

Pelajaran penting yang bisa dipetik dari pergeseran paradigma yang berlangsung adalah bahwa pendasaran fanatik pada satu paradigma akan menciptakan jebakan. Jebakan itu berupa pembenahan atas substansi masalah pembangunan secara sepenggal-sepenggal (pertumbuhan ekonomi, pemutusan ketergantungan, pelestarian lingkungan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pembebasan manusia); keterlibatan sejumlah aktor secara sendiri-sendiri (pemerintah, swasta dan masyarakat sipil); dan penempatan unit secara seragam (nasional/pusat). Untuk keluar dari jebakan itu, diperlukan pendasaran baru yang lebih multiparadigmatik

Dibanding empat paradigma lain yang muncul setelah paradigma modernisasi, paradigma endogen lebih komprehensif dalam menjawab masalah pembangunan, sehingga ia lebih berposisi sebagai pendasaran yang multiparadigmatik. Dalam paradigma endogen, pertumbuhan ekonomi, masalah ketergantungan, kerusakan lingkungan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pembebasan manusia dari ketertindasan, semuanya diakomodasi, dengan satu prinsip bahwa inisiatif dan sumberdaya pertama-tama harus datang secara dari dalam masyarakat itu sendiri.

Fokus dari paradigma endogen adalah bagaimana entitas suatu masyarakat dapat mengatasi masalah kehidupan (pertumbuhan ekonomi, ketergantungan kepada pihak luar, kerusakan lingkungan, pemenuhan kebutuhan dasar, ketakbebasan dan penindasan) sesuai kemampuan yang mereka miliki dan menurut aspirasi

mereka sendiri. Menuju pendasaran multiparadigmatik dalam pembangunan berarti menuju keberlakuan paradigma endogen.

PEMBANGUNAN DENGAN SAINS BARU

Sebagai produk ilmu, pendasaran pembangunan saat ini berada pada titik bifurkasi, sebuah titik akhir perjalanan yang membawanya pada persimpangan. Sains modern (*modern science*) yang selama ini menjadi pendasaran paradigmatis pembangunan (dari paradigma modernisasi hingga paradigma endogen) telah mengalami anomali, bahkan telah mengalami krisis. Untuk mengatasi krisis tersebut, terdapat dua alternatif: melakukan loncatan akumulatif teori/konsep dengan tetap bertahan pada sains modern, atau melakukan revolusi paradigma keilmuan secara radikal. Alternatif pertama menghadirkan paradigma *digitalisme informatisme* yang sebenarnya hanya hasil loncatan dari paradigma sains modern, alternatif kedua menghadirkan paradigma *holisme dialogisme* yang merupakan hasil dari sebuah revolusi paradigma keilmuan (Amien, 2005). Sains baru lahir mengisi alternatif yang kedua.

Paradigma holisme-dialogisme adalah paradigma ilmu yang berbasis pada pandangan sains post-Newtonian, sains post-Cartesian. Sains yang menggeser prinsip reduksionisme ke holisme, menggeser obyektivisme ke proses epistemologis, menggeser determinisme ke probabilisme. Sains yang menempatkan pencarian makna dan hakekat kehidupan sebagai pilar utama. Dengan sains baru (*new science*) inilah makna pembangunan dicoba elaborasi.

Dalam paradigma holismedialogisme, diasumsikan bahwa obyek bukan lagi entitas yang merepresentasikan realitas, realitas lebih direpresentasikan oleh interkoneksi, karena itu *entitas pembangunan* adalah perwujudan interkoneksi itu sendiri. Bukan kinerja komponen (/sektor pembangunan) yang menjadi perhatian melainkan pada hubungan yang tercipta, pada interkoneksi diantara komponen (/sektor pembangunan) tersebut. Perwujudan interkoneksi disebut tatanan, dan hakekat interkoneksi sebuah tatanan terletak pada *emergence-resources* yang ditimbulkannya, fitur baru yang dihasilkannya, karena fitur baru inilah yang menjamin sustainability.

Pengaturan, struktur dan proses adalah konsep kunci dalam memahami hakekat tatanan (Amien, 2005). Pengaturan menjelma sebagai nilai dan norma dalam dunia sosial (hasil konvensi) dan hukum alam dalam dunia natural (terberikan). Struktur adalah perwujudan interaksi antar komponen masyarakat; pola pengelolaan, ketersediaan dan kualitas sumberdaya dan lingkungan hidup; kualitas dan ketersediaan sumberdaya buatan; serta organisasi dan teknostruktur dalam masyarakat. Proses adalah hubungan antara pola pengaturan dengan struktur. Ia adalah aktivitas sosial-ekonomi-budaya dan proses alamiah untuk mempertahankan dan mengembangkan struktur agar mampu beradaptasi dengan lingkungannya sesuai pola pengaturannya. Inilah dimensi utama dari tatanan, dimensi utama dari entitas pembangunan.

Bila konsep entitas pembangunan ini lebih dioperasionalkan, maka

sebenarnya terdapat tiga unsur dalam entitas pembangunan (Ohama, 2002). Pertama, unsur sumberdaya (*resources*), mencakup sumberdaya fisik, manusia dan finansial/teknologi yang terdapat pada sebuah tatanan. Kedua, unsur organisasi (*organizations*), mencakup agregasi sejumlah individu manusia yang berfungsi mengelola sumberdaya dalam tatanan. Ketiga, unsur norma (*norms*), yang berfungsi sebagai acuan bagi organisasi dalam mengelola sumberdaya untuk pencapaian tujuan sesuai misi/visi tatanan.

Dalam paradigma holismedialogisme, pembangunan lebih didefinisikan sebagai *upaya meningkatkan kapasitas tatanan agar senantiasa mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sehingga dapat menciptakan peluang dari perubahan itu* (Amien, 2005). Tatanan berkualitas dicirikan oleh keadilan atas komponen pembentuk tatanan (*choice and voice*), kemampuan menghasilkan fitur baru dari interkoneksi, dan kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan yang digulirkan oleh spirit zaman.

Pelaku peningkatan kapasitas itu adalah tatanan itu sendiri, dalam arti seluruh manusia yang ada dalam tatanan, sesuai dengan karakteristik pengorganisasian diri dari manusia-manusia itu, secara kontekstual. Peningkatan kapasitas itu dilakukan melalui perubahan kontinyu dalam struktur tatanan, untuk menyesaikannya dengan tuntutan perubahan yang berasal dari spirit zaman, berasal dari *strange attractor*, yang merupakan variabel non-lokal. Prosesnya berlangsung alami, tidak dihasilkan oleh *grand-scenario*, ia dibentuk oleh proses yang dipilih secara otonom oleh setiap komponen tatanan.

Dengan pendefinisian demikian, konsep perencanaan pembangunan mengalami perubahan, dari “pola formulasi tindakan- tindakan tertentu dalam tahapan-tahapan tertentu untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu” ke “penyiapan tatanan untuk menghadapi dinamika lingkungan tatanan tersebut di masa depan”. Ini yang disebut sebagai *adaptive-planning* (Amien, 2005). Menurut Banathy (1993), penyiapan itu dilakukan dengan meningkatkan kompetensi berevolusi (*evolutionary competency*) sebagai syarat untuk bisa mengarahkan evolusi, karena kompetensi itulah yang memungkinkan kita menciptakan realitas yang sesuai dengan visi kita. Inti dari “kemampuan mengarahkan evolusi” adalah *self-organizing capacity (SOC)* dengan unsur-unsur: kualitas identitas diri (terkait dengan visi/misi dan nilai/norma), keragaman dan diversitas (terkait dengan kemampuan menyelaraskan keragaman eksternal dengan keragaman internal) dan kesadaran berevolusi (kesadaran diri sebagai bagian tak terpisahkan dari semesta sehingga keikutian berevolusi adalah keniscayaan). Secara operasional, inti dari SOC ini adalah kemampuan sebuah tatanan menyesuaikan pola interkoneksi *resources (R)-organizations (O) -norms(N)*nya dalam merespons perubahan spirit zaman.

Dengan mengacu pada paradigma holisme-dialogisme, beberapa poin reflektif dapat diajukan. *Pertama*, bahwa pembangunan idealnya tidak dilihat pada bidang/sector penyusunnya lalu bidang/sector itu dibenahi secara masing-masing dengan asumsi bahwa penjumlahan hasil pembenahan itu adalah wajah keseluruhan pembangunan. Entitas

pembangunan bukan sekedar sektor/bidang tetapi interkoneksi sejumlah unsur pada sebuah tatanan (sumberdaya, organisasi dan norma-norma) secara holistik dan interkoneksi tatanan itu sendiri dengan tatanan lainnya.

Kedua, bahwa perencanaan pembangunan idealnya lebih dimaknakan sebagai “penyiapan tatanan untuk menghadapi dinamika lingkungan tatanan tersebut di masa depan”. Peranan yang bisa dimainkan pemerintah di sini adalah menciptakan panggung dan memfasilitasi peningkatan kompetensi berevolusi (*evolutionary competency*) tatanan-tatanan signifikan pada tingkat lokalitas, baik lokalitas itu identik dengan satu Kabupaten/Kota maupun lokalitas itu berbasis lintas Kabupaten/Kota.

Ketiga, bahwa secara operasional, upaya penciptaan panggung tersebut dapat termanifestasikan melalui perumusan kebijakan pembangunan yang cakap, di tengah geliat otonomi daerah saat ini; sedangkan fasilitasi peningkatan kompetensi berevolusi dapat dilakukan dengan memfasilitasi daerah mengembangkan tatanan dengan menerapkan prinsip-prinsip *adaptive-planning* dan *evolutionary system design*. Operasionalisasi ini idealnya bergulir dalam prinsip *small-first* tetapi memiliki makna strategis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, B, 1993. “Sustainable Development and the Greening of Development Theory”, dalam F.J. Schuurman (ed.), *Beyond the Impasse: New Direction in Development Theory*. London: Zed Books.

- Cardoso, F.H., 1978. "Associated-Dependent Development: Theoretical and Practical Implications", dalam A. Stephen (ed.), *Authoritarian Brazil*. New Haven: Yale University Press.
- Craig, G. dan M. Mayo, 1995. *Community Empowerment: A Reader in Participation and Development*. London: Zed Books.
- Dag Hammarskjold Foundation, 1975. "What Now: Another Development". *Development Dialogue* (No.1-2).
- Dos Santos, T., 1971. "The Structure of Dependence", dalam KT. Kan dan D.C Hodges (eds.), *Reading in the US Imperialism*. Boston: Horizons Book.
- Evans, P., 1981. *Dependent Development*. Princeton: Princeton University Press.
- Freire, P., 1975. *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Herder and Herder.
- Friedman, J., 1992. *Empowerment: The Politics of Alternative Development*. Oxford: Balckwell.
- Gardner, K. dan D. Lewis, 1996. *Anthropology, Development and the Postmodern Challenge*. London: Pluto Press.
- Germani, G., 1981. *The Sociology of Modernization: Studies on Its Historical and Theoretical Aspects with Special Regard to the Latin American Case*. London: Transaction Books.
- Hoogendijk, W., 1991. *The Economic Revolution: Towards a Sustainable Future by Freeing the Economy from Money-Making*. London: Green Print.
- Hopkins, T. dan I. Wallerstein, 1977. "Patterns od Development of the Modern World Systems: Research Proposal", *Review*, Vol.1, No.2.
- Kuhn, T., 1962. *The Structure of Scientific Revolution*. Chicago: University of California Press.
- McClelland, D.C., 1961. *The Achieving Society*. New York: Litton Education Publishing
- Prebisch, R., 1953. *The Economic Development of Latin America and its Principal Problems*. New York: United Nations.
- Rostow, W.W., 1960. *The Stages of Economic Growth*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sachs, W., 1992. *The Development Dictionary: A Guide to Knowledge as Power*. London: Zed Books Ltd.
- Smelser, N., 1964. "Toward a Theory of Modernization", dalam A. Etzioni dan E. Etzioni (eds.), *Social Change*. New York: Basic Books.
- Streeten, P., 1981. *First Things First: Meeting Basic Human Needs in the Development Countries*. London: Oxford University Press.
- Warren, B., 1980. *Imperialism: Pioneer of Capitalism*. London: Verso